

Tanggung jawab dewan komisaris terhadap jual beli aset PT. Hansa Sativa Abadi : studi Putusan No.1230 K/Pdt/2010 = Responsibility of the board of commissioners for the sale and purchase of assets PT Hansa Sativa Abadi : study Verdict no. 1230 K/Pdt/2010

Keumala Sari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349435&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab komisaris utama yang melakukan transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan dan kekuatan hukum akta perjanjian jual beli saham dan aset yang mereka buat. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Direktur dalam perseroan telah meninggal dunia, tetapi ia juga memiliki saham dalam perseroan. Saham yang dimilikinya kemudian beralih menjadi bagian ahli waris yaitu anak dan istrinya. Dalam transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan ini, komisaris utama mewakili diri sendiri sebagai pemilik saham dan selaku ibu yang mewakili anaknya yang di bawah umur. Jual beli terhadap saham dan aset tersebut dilakukan oleh komisaris utama dan pihak luar yang bukan merupakan organ maupun pemegang saham dalam perseroan. Akta perjanjian jual beli yang telah mereka buat dapat dibatalkan, karena salah satu syarat sah dalam perjanjian yaitu cakap hukum, tidak terpenuhi.

ABSTRACT

This thesis discusses the responsibilities of chief commissioner who did the transfer of shares and assets of the company and deed legal power purchase agreement the transfer of shares and assets of the company. The method of writing this thesis is normative. Director of the company had died, but he also has a stake in the company. Its shares later becoming part of the heirs of his wife and children. In exchange for the transfer of shares and assets in the company, chief commissioner representing oneself as a shareholder and as the mother who represents the minor child. The sale and purchase of the shares and assets are done by the commissioner and the outsiders who are not organ or shareholders in the company. Deed of sale and purchase agreements they have made can be canceled, because one of the conditions in the agreement are legally capable of law, are not met.